

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Afriana dan Rai Mantili. (2017). “Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia. Vol. 2 No. 2. Universitas Padjajaran.” Diakses dari <https://journal.unsika.ac.id/jurnalilmiah hukumdejure/article/view/1301/1063>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Indonesia. 2016. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. 20 Oktober 2024. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Casanova, Febri Yanti, Lindati D., Diane E.R. (2018). “Hukum Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.SusPKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst), Vol. 1 No.2 , *Pactum Law Journal*. Hal. 93” Diakses dari <https://repository.lppm.unila.ac.id>
- Christiaan, Rio. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*. Depok: Rajawali Pers.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iryan Harsono dan Paramita Prananingtyas. (2019). “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, Vol. 12 No. 2, *Notarius*.” Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29154/16807>
- Kartika. 2009. *Analisa Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus B.V Melawan PT. Argo Pantes Tbk. Dalam Perkara Kepailitan*. Tesis: Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/20269965-T37306-Kartika.pdf>
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Komaruddin. 1974. *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis*. Bandung: Angkasa Offset

- Lontoh, Rudhy A., dkk (ed.). 2001. *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Edisi Pertama. Bandung: Penerbit Almunir.
- Niru A.S dan Nunuk Sulisrudatin. (2016). "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia.Vol.7. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Hal. 161." Diakses dari <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Smg. Jo. Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg.
- Sidabutar, LMJ, 2019, "Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti. Vol. 5, no. 2. Jurnal Antikorupsi Integritas." Diakses dari <https://jurnal.kpk.go.id>
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Shubhan, M. Hadi. 2009. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Diakses dari https://kupdf.net/download/hukum-perjanjian_59bca9b408bbc59509686eba_pdf
- Sunarmi. 2017. *Hukum Kepailitan*. Depok: Kencana.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjowinoto, Petrus., et al. 2020. *Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784>
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing. Diakses dari www.scribd.com